BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat merupakan negara adikuasa yang selalu menjadi sorotan dunia internasional baik dari aspek politik, ekonomi maupun militer. Amerika Serikat sering menjadi tolak ukur dunia dalam berbagai aspek, dimana setiap pergantian kepemimpinan menjadi hal yang menarik dan sorotan dalam berbagai media cetak maupun elektronik di dunia. Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat pada 2016 lalu menjadi babak baru bagi negara dengan julukan super power tersebut. Dengan slogan *Make America Great Again* yang artinya membuat Amerika kembali berjaya, menarik perhatian warga Amerika yang pada akhirnya membawa Donald John Trump dari Partai Republik melangkah ke Gedung Putih (Ventura, 2016).

Pada era globalisasi saat ini, kondisi internasional mengarah pada liberalisme institusional dengan berbagai macam bentuk kerjasama, seperti kerjasama dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, dan lain-lain. Adanya sebuah institusi internasional yang menjadi tempat dan tujuan para negara untuk melakukan hubungan internasional dengan berorientasi pada keuntungan dalam sistem internasional. Kaum liberalisme institusional mempercayai bahwa hubungan kerjasama yang diciptakan dalam institusi internasional dapat mencegah adanya perang dalam negara - negara yang terlibat di dalamnya (Papa, 2017). Sehingga pada dewasa ini, banyak negara tergabung dalam organisasi dan institusi internasional untuk memperoleh keuntungan dari kerjasama – kerjasama

yang dilakukan. Begitupun dengan Amerika Serikat yang sudah terlibat dalam berbagai Organisasi dan Institusi internasional.

Keadaan ekonomi global saat ini menganut pada sistem ekonomi liberal yang juga disebut sistem ekonomi pasar bebas dimana setiap unit pelaku kegiatan ekonomi memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebanyak - banyaknya. Ditandai dengan adanya tren perdagangan bebas dimana Perdagangan bebas lebih mengacu kepada kebijakan pemerintah yang tidak menggangu arus perdagangan dan menghilangkan hambatan dalam perdagangan baik bersifat hambatan tarif (*tariff barrier*) maupun non-tarif (*non-tariff barrier*) (Kemendag, 2014). Amerika Serikat termasuk negara yang mendukung sistem ekonomi liberal, dimana ia telah terlibat dalam perdagangan bebas dunia. Perjanjian perdagangan telah dilakukannya sejak dahulu dengan tujuan kemakmuran. Beberapa pakta perdagangan yang telah dilakukannya seperti *World Trade Organisation* (WTO), *North American Free Trade Agreement* (Nafta) , *Trans Pacific Partnership* (TPP), *Transatlantic Trade and Investment Partnership* (TTIP).

Di tengah gencarnya dunia internasional yang melakukan berbagai kerjasama yang dikemas dalam kerjasama multilateral dan tren perdagangan bebas untuk memajukan prekonomian global, berbanding terbalik dengan kebijakan ekonomi Donald Trump sebagai Presiden AS yang baru. Seperti janjinya ketika kampanye bahwa ia akan melakukan kebijakan proteksionis terhadap perekonomian AS. Dalam Kamus Ekonomi, proteksionisme diartikan dalam dua hal. Pertama, proteksionisme merupakan paham perlindungan terhadap dunia usaha yang dilakukan pemerintah. Kedua,

proteksionisme adalah kebijakan yang disengaja oleh pemerintah sebagai upaya pengendalian terhadap impor atau ekspor, dengan jalan mengatasi berbagai hambatan perdagangan, seperti tarif kuota, yang bertujuan untuk melindungi industri atau dunia usaha dalam negeri dari persaingan dengan industri luar negeri (Sumadji et al, 2006).

Proteksionis tentu bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas, dan berhubungan erat dengan istilah anti globalisasi dan anti imigrasi. Berbagai bentuk proteksionisme ekonomi Amerika Serikat oleh Trump diantaranya langkah Trump untuk menaikkan tarif impor hingga 45% untuk produk-produk buatan Cina. Tidak hanya negara tersebut, Meksiko, Kanada dan negara di kawasan Uni Eropa menjadi target bahkan sudah menjadi korban kebijakan tarif AS tersebut. Selain itu, dalam konteks multilateral Amerika Serikat melalui Trump telah menyatakan keluar dari keanggotaan *Trans Pacific Partnership* (TPP), bahkan Amerika juga ingin melakukan renegosiasi NAFTA yang selama ini menjadi pengikat kerjasama perdagangan antara Kanada, AS dan Meksiko. Kemudian Trump juga berkeinginan untuk membangun pagar di bagian selatan Amerika Serikat yang berbatasan dengan Meksiko (Jatmiko, 2016). Hingga larangan masuknya imigran ke AS. Langkah Amerika Serikat untuk menerapkan proteksionisme ekonominya tersebut tentu menjadi pertanyaan, sekaligus memunculkan kekhawatiran bagi stabilitas perdagangan dunia yang sudah saling terhubung, mengingat perekonomian Amerika termasuk menjadi sorotan dan tolok ukur negara – negara lain di dunia yang akan mempengaruhi perekonomian global.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, hal yang menjadi masalah ialah "Faktor – faktor apa yang mendorong Amerika Serikat pada era Donald Trump melakukan proteksionisme ekonomi ?"

C. Kerangka Teori

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka untuk menganalisa faktor - faktor apa saja yang mendorong Amerika Serikat melakukan proteksionisme ekonominya, maka penulis menggunakan teori yaitu :

1. Konsep Kepentingan Nasional

Peran Negara sebagai aktor dalam mengambil setiap keputusan memiliki peranan penting dalam melakukan hubungan internasional yang memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Sehingga hal tersebut merupakan hal penting bagi warga negara yang menduduki wilayah tersebut. Seorang ahli, Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara berperan melindungi wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa adanya peran negara dalam menjamin alat-alat maupun keamanan dalam mencapai kesejahteraan , kehidupan bermasyarakat jadi memiliki batasan (Robert Jackson dan Georg Sorensen, 2009). Sehingga ruang gerak oleh suatu

bangsa dibutuhkan sebagai kontrol dari sebuah negara.

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan sebuah negara dipengaruhi oleh kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari dari suatu power yang ingin diciptakan sehingga negara dapat mempertimbangkan berupa dampak langsung agar mendapat pengakuan dunia. Peran sebuah negara dalam menunjukkan hal - hal sebagai dasar dari kepentingan nasional akan selalu menjadi sorotan masyarakat internasional sebagai negara yang melakukan hubungan internasional terlihat dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional suatu negara secara konseptual diciptakan untuk menjelaskan sikap politik luar negeri sebuah negara (Sitepu, 2011). Kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional merupakan sebuah konsep yang saling keterkaitan dalam hubungan internasional, karena kepentingan nasional menjadi dasar dari sebuah kebijakan luar negeri suatu negara yang pada hakikatnya mengarahkan terciptanya kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, konsep kepentingan nasional memiliki peranan penting dalam kebijakan luar negeri negara yang berdaulat (Abdulrasheed Adamu, et all, 2016). Dinesh, Hans J. Morgenthau menjelaskan bahwa kepentingan nasional merupakan kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan tersebut, para pemimpin

suatu negara dapat memutuskan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain yang bersifat kerjasama maupun konflik (Dinesh, 2016).

Dari kutipan tersebut, Morgenthau menyimpulkan bahwa kepentingan nasional suatu negara merupakan sebuah upaya untuk mempertahankan identitas negara dari ancaman negara - negara lain. Identititas tersebut kemudian menjadi tujuan-tujuan fundamental yang hendak dicapai oleh suatu negara dan bertujuan sebagai determinan utama dalam membentuk kebijakan politik luar negeri (Plano, J. C, 1969, p. 128)**.** Adanya kepentingan nasional memberikan gambaran bahwa terdapat aspek-aspek yang menjadi identitas sebuah negara. Hal tersebut terlihat dari sejauh mana fokus negara dalam memenuhi target pencapaian demi kelangsungan bangsanya. Dari identitas yang diciptakan kemudian dirancang untuk memenuhi target dalam waktu yang ditentukan, bersifat sementara ataupun untuk kelangsungan jangka panjang. Hal ini selaras dengan seberapa penting identitas tersebut, apakah penting ataukah sebagai hal yang biasa saja.

Morgenthau memaknai kepentingan nasional sebagai usaha suatu negara dalam mengejar *power*, dimana power adalah segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk mengendalikan negara lain. Dalam konsep kepentingan nasional, sebenarnya mengandung makna untuk melindungi, membela, dan memelihara negara itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan Morgenthau dalam buku *Politics Among*

Nations: *"When we speak of power, we mean man's control over the minds and actions of other men*." (Guzzini, 2018). Kepentingan nasional sering digunakan untuk menjelaskan perilaku suatu negara dalam politik internasional dan sebagai tolok ukur kesuksesan politik luar negeri negara tersebut (Mas'oed, 1988, p. 135). Kepentingan nasional juga sering kali dimanfaatkan sebagai legitimasi dari keputusan yang dipilih oleh kebijakan luar negeri suatu negara (Burchill, 2005, p. 3). Pada dasarnya kepentingan suatu bangsa tidak terlepas dari peningkatan sektor ekonomi. Setiap negara di dunia mempunyai tujuan untuk memajukan dan mengembangkan ekonomi negaranya. Tujuan tersebut meliputi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, baik individu maupun secara keseluruhan yang dapat dicapai melalui jangka pendek ataupun dalam kurun waktu yang lama. (Larasati, 2017).

Pada kasus proteksionisme ekonomi Amerika ini, adanya kebijakan ekonomi proteksionis tentunya tidak terlepas dari kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional AS ini tentunya berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi yaitu kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh negara tersebut. Amerika Serikat pada era Trump ini memiliki kepentingan untuk memajukan perekonomiannya, pasalnya selama delapan tahun pemerintahan Barack Obama, perekonomian Amerika mengalami penurunan yang signifikan. Obama merupakan

satu-satunya Presiden AS dalam sejarah modern yang pertumbuhan ekonominya tidak mencapai 3% dalam setahun tepatnya pada tahun 2016. Biro analisis data ekonomi AS menunjukkan hanya Herbert Hoover yang menjadi presiden pada 1929-1933, yang pertumbuhan ekonominya tidak sampai 3% dalam setahun. Namun kondisi tersebut berbeda dengan era Obama, karena saat itu ekonomi dunia dalam depresi besar. Setelah Hoover, pertumbuhan serendah itu kemudian terjadi kembali pada era Obama (Ventura, 2016).

Amerika Serikat ingin kembali mencapai pertumbuhan ekonomi tahunan yang berkesinambungan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mampu mencapai 3 persen ke atas (Kurniawan, 2017). Selain itu pula untuk memajukan perekonomiannya tersebut, Amerika memutus kerjasama yang dianggap kurang menguntungkan. Seperti contohnya keluarnya AS dalam kerjasama multilateral TPP (*Trans Pacific Partnership*). Kemudian kepentingan nasional Amerika yang mutlak ialah bahwa Amerika berusaha mempertahankan status negaranya sebagai negara super power di dunia ini dan hanya ada satu super power yang berhak mengendalikan masa depan dunia. Itu artinya bahwa Amerika tidak akan membiarkan negara manapun menyaingi bahkan merebut status super power tersebut. Amerika akan menyerang dan mencegah apabila hal tersebut terjadi dengan berbagai kebijakan. Seperti contohnya yang sedang dialaminya yaitu bangkitnya China dan kerja keras untuk meraih posisi kejayaan China dalam pengembangan

ekonomi, militer, teknologi dan budaya. Dimana apa yang dilakukan China tersebut mengancam posisi Amerika sebagai satu – satunya negara super power yang memiliki keunggulan segala aspek di atas di dunia internasional ini (Cipto B. , 2018, p. 197).

2. Teori Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri

Teori Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri mampu menjelaskan alasan dibalik setiap pengambilan kebijakan luar negeri yang dibuat oleh negara. Teori Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri menurut Richard Snyder digunakan untuk menjelaskan apa yang melatarbelakangi kebijakan tersebut dibuat. Proses pengambilan keputusan luar negeri merupakan sebuah proses yang dijadikan alat untuk menjelaskan tindakan yang diambil oleh masing - masing negara dalam hubungan internasional. Dalam pandangan Snyder, proses pembuatan keputusan dilakukan untuk menganalisa apakah keputusan itu dapat mempengaruhi hasil atau tidak. Untuk mengetahui pula apakah perbedaan proses pembuatan keputusan juga akan menghasilkan keputusan yang berbeda juga, serta menelusuri apakah keterlibatan individu atau kelompok juga dapat mempengaruhi suatu hasil keputusan ataukah tidak (Holsti, 1988, p. 158).

Menurut William Coplin suatu negara akan memutuskan kebijakan luar negerinya berdasarkan dengan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya. Ada beberapa hal yang harus dipahami sebelum

mengetahui cara pengambilan keputusan politik luar negeri suatu negara terhadap sebuah isu. William D. Coplin menggunakan analisis pendekatan rasionalitas dalam bukunya, *Introduction to Internasional Politics*. Pendekatan rasionalitas menekankan bahwa negara akan berusaha untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Untuk mencapai kepentingan nasional tersebut, negara mengkalkulasikan secara rasional situasi dan posisi negara di dalam kancah politik global. Pada pendekatan ini berarti politik luar negeri yang dilakukan oleh suatu negara merupakan sebuah respon dari politik luar negeri negara lain. Setiap respon apa saja yang dilakukan merupakan bentuk dari sebuah pertimbangan yang rasional. Menurut William D.Coplin, Teori pengambilan keputusan Luar Negeri atau *Foreign policy*, Yaitu (Coplin, 2003) : " apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijkan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan."

Untuk lebih jelas dalam memahami teori pembuatan kebijakan politik luar negeri, maka berikut ditampilkan model pembuatan kebijakan politik luar negeri William Coplin.

Gambar 1.1
Diagram Teori Pembuatan Kebijakan Politik Luar Negeri

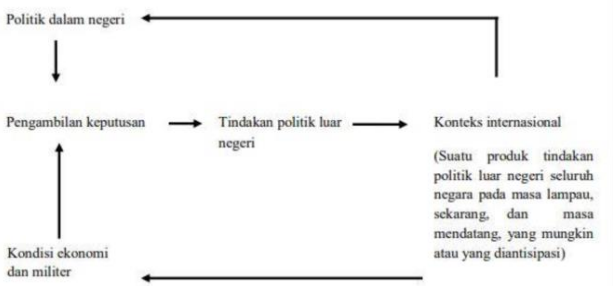

Sumber : William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis Edisi Kedua (Coplin & Marbun, Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis,2003, hal.30)

Model pembuatan kebijakan luar negeri William Coplin di atas dapat disimpulkan bahwa faktor politik dalam negeri, situasi politik Internasional dan ekonomi atau militer menjadi sebuah penentu suatu negara dalam mempertimbangkan politik luar negerinya. Sehingga hal - hal tersebut saling mempengaruhi satu dengan yang lain untuk mendorong adanya kebijakan politik luar negeri. Dapat dikatakan bahwa tindakan politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri.

A. Kondisi Politik Dalam Negeri

Keadaan atau situasi di dalam negeri yang akan membuat keputusan, yaitu situasi politik di dalam negeri itu yang berkaitan

dengan keputusan tersebut, termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku manusianya. Dalam pengambilan suatu keputusan politik luar negeri yang dipaparkan oleh William D.Coplin terdapat aktor-aktor yang dapat mempengaruhi kebijakan politik luar negeri atau biasa disebut dengan "*policy influencer*" (yang mempengaruhi kebijakan), dimana itu dianggap sebagai hubungan timbal balik yang sangat kompleks, kerena mereka merupakan sumber dukungan baginya. Pengambil keputusan menentukan kepentingan nasional, merencanakan strategi dan merancang kebijakan atau mengevaluasi kebijakan yang sudah dilaksanakan. Dalam beberapa negara, pemimpin negara (Presiden, Perdana Menteri, atau Raja) merupakan aktor dominan dalam pengambilan keputusan (Coplin, 2003, p. 74). William D. Coplin mengkategorikan *policy influencer* menjadi empat macam yaitu, *bureaucratic influencer, partisan influencer, interest influencer, dan mass influencer* (*Ibid*, 82 - 91).

- *Bureaucratic influencer* yaitu berbagai individu atau kelompok serta organisasi dalam sebuah lembaga eksekutif pemerintah yang membantu para pengambil keputusan dalam menyusun serta melaksanakan kebijakan. Kemudian kelompok - kelompok birokratis menjadi sangat berpengaruh apabila mereka merupakan anggota dari pengambil keputusan.

- *Partisan influencer*, mereka bertujuan mengartikan tuntutan dan aspirasi masyarakat menjadi tuntutan politis, yaitu tuntutan kepada para pengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan - kebijakan pemerintah.
- *Interest influencers*, terdiri atas berbagai individu yang bergabung bersama dalam satu kepentingan yang sama, belum cukup menjadi dasar bagi aktivitas kelompok partai, namun sangat dibutuhkan untuk menyerahkan sumber-sumber demi mendapat dukungan dari pengambil keputusan yang lain.
- *Mass influencers*, merupakan suatu opini publik dibentuk oleh media massa yang dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan pada saat menyusun politik luar negeri. Dampak *mass influencers* bisa beraneka ragam tergantung kepada sistem politik yang dianut suatu negara.

Tipe *interest influencers* adalah tipe yang tepat untuk menganalisa politik dalam negeri Amerika Serikat yang mempengaruhi pengambil keputusan untuk memutuskan suatu politik luar negeri. Aktor yang dimaksudkan *interest influencers* dalam kebijakan ekonomi proteksionis Amerika Serikat ini ialah masyarakat dalam negeri AS terutama para pengusaha dalam negeri AS yang begerak di bidang manufaktur. Mereka telah melakukan

pertemuan langsung dengan Presiden Donald Trump di Gedung Putih. Pertemuan tersebut guna membahas keanggotaan AS di TPP, yang dihadiri oleh 12 pemimpin perusahaan manufaktur AS. Para pemimpin perusahaan menyampaikan keluhan berupa tantangan dan hambatan jika AS tetap bergabung dalam keanggotaan TPP. Dalam kesempatan tersebut para CEO perusahaan menyampaikan keluhan sekaligus memberikan tekanan kepada Trump untuk keluar dari TPP karena memang TPP telah memberikan dampak buruk bagi perusahaan – perusahaan manufaktur yang dimilikinya. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Donald Trump, pasalnya mereka yang diundang ke gedung putih bukan sembarang orang, akan tetapi karena mereka adalah orang – orang yang menjadi donatur Partai Republik pada pencalonan Presiden Amerika Serikat tahun 2016 silam. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa para pengusaha merupakan *interest influencers* karena memiliki kepentingan yang sama untuk memberikan pengaruhnya kepada Donald Trump sebagai pertimbangan dalam memutuskan sebuah kebijakan politik luar negeri.

Selain itu, yang menjadi tuntutan politik dalam negeri AS datang dari para pemilih Trump yaitu rakyat Amerika Serikat yang telah memilih Trump untuk menjadi pemimpin AS. Tuntutan yang demikian dapat disebut dengan opini publik yang turut mempengaruhi pengambilan keputusan politik

luar negeri Amerika Serikat. Isu tentang imigrasi , terorisme dan ekonomi yang sangat menarik perhatian masyarakat Amerika Serikat menjadi salah satu jalan kesuksesan kemenangan Trump dalam pemilihan Presiden AS 2016 silam. Partai politik yang diusung Trump jelas mendukung isu - isu yang dibawakan Trump ketika kampanye untuk memperoleh suara semaksimal mungkin. Isu yang diangkat menarik perhatian publik Amerika Serikat, pasalnya kondisi dalam negeri Amerika Serikat perlu banyak dibenahi karena ada beberapa masalah yang diduga disebabkan kebijakan imigrasi Amerika yang terlalu longgar, imigran ilegal dan pengungsi.

Dalam pengambilan keputusan politik luar negeri, faktor geografis juga berperan. Keadaan geografis negara termasuk dalam batas geopolitik suatu negara yang mempunyai dampak besar pada perpolitikan di negara lain. Hal ini berkaitan dengan negara tetangga yang berbatasan dekat dengan negara yang lain. Amerika Serikat berbatasan langsung dengan Meksiko. Imigran ilegal dari Meksiko dianggap oleh Presiden Trump membawa potensi peningkatan tingkat kriminalitas di Amerika. Sementara imigran dan pengungsi dari negara-negara yang mayoritas beragama Islam dilihat sebagai kelompok yang berisiko tinggi terlibat terorisme. Oleh karena itu ketika kampanye dalam pemilihan presiden Amerika Serikat, Trump berjanji untuk benar – benar membatasi masuknya imigran ke negaranya. Pembatasan masuknya imigran ke Amerika

tersebut selain demi keamanan juga berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri AS agar tidak dikuasai oleh para imigran melainkan memprioritaskan terlebih dahulu para warga negara AS. Untuk meminimalisir masuknya imigran ilegal ke AS, salah satu jalan yang ingin ditempuh Trump dengan melakukan rencana untuk mambangun tembok pembatas pada perbatasan antara Amerika dengan Meksiko. Maka, pada saat Trump benar - benar terpilih menjadi Presiden AS, hal yang kemudian harus ia lakukan yaitu menepati janji - janjinya semasa kampanye untuk menyenangkan para pemilihnya dan mengatasi permasalahan dalam negeri AS, dengan mengeluarkan kebijakan – kebijakan proteksionismenya.

B. Situasi Ekonomi dan Militer

Situasi ekonomi dan militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan. Perekonomian Amerika Serikat mengalami kemunduran signifikan pada masa Obama dimana hal tersebut merupakan satu-satunya Presiden AS dalam sejarah modern yang pertumbuhan ekonominya tidak sampai 3% dalam setahun. Amerika Serikat pada era Trump ingin kembali mencapai pertumbuhan ekonomi tahunan yang berkesinambungan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) AS mencapai 3% ke atas (Kurniawan, 2017).

Selain itu pula Pemerintah Amerika Serikat berusaha melindungi industri - industri dalam negerinya ditengah gencarnya pasar bebas yang dibanjiri oleh produk – produk asing terutama produk Cina sehingga mengakibatkan industri dalam negeri tersaingi. Terlebih setelah adanya beberapa industri dalam negeri AS yang mengalami gulung tikar karena kalah dengan produk luar yang semakin membanjiri pasar dalam negerinya. Pemerintah disini berperan melindungi industri dalam negerinya agar hal serupa tidak terjadi lagi bahkan berusaha memaksimalkan terhadap produk maupun usaha dalam negerinya sehingga membantu bangkit dan memajukan industri dalam negerinya kembali.

Trump menganggap permasalahan imigran dan perdagangan bebas sebagai dua penyebab bagi tingginya angka pengangguran di Amerika. Ia meyakini bahwa jika permasalahan tersebut mampu teratasi maka akan membawa Amerika pada kejayaannya kembali, tepatnya membangun ekonomi AS yang lebih besar : "*If we do what we have to do correctly, we can create the biggest economic boom in this country since the New Deal when our vast infrastructure was first put into place. It's a no-brainer. It's so obvious that even the Democrats can figure it out."* (Trump, Declaring American Economic Independence, 2016).

Pada tahun 2017 jumlah pengangguran di Amerika meningkat dari yang diperkirakan.

Sementara nilai penjualan rumah turun pada bulan Juli tahun 2017. Sekitar 5,27 miliar saham berpindah tangan di bursa AS, di bawah rata-rata 6,08 miliar harian selama 20 sesi terakhir (Nurmayanti, 2017). Saat ini hutang Amerika telah mencapai 20,6 triliun dollar lebih tinggi dari GDP 19,5 triliun dollar. Selain itu pula Amerika mengalami defisit neraca perdagangan dengan Cina. Pada tahun 2017 nilai impor Amerika dari Cina 506 miliar dollar sementara nilai ekspor Amerika ke Cina hanya 130 miliar dollar, dengan demikian defisit neraca perdagangan Amerika dengan Cina adalah sekitar 375 miliar dollar. Menurut Trump, defisit sebanyak itu merupakan bukti bahwa perusahaan Amerika diperlakukan tidak adil. Kondisi demikian memicu munculnya perang dagang antara Amerika dan Cina sebagai konsekuensi logis dari sikap keras Amerika terhadap Cina. Perang dagang tersebut dipahami sebagai konteks tanggapan Amerika terhadap kebangkitan Cina. Lebih jauh perang dagang merupakan dimensi dari rivalitas Amerika vs Cina dalam proses perebutan status super power. (Cipto B. , 2018)

Kemajuan ekonomi dan militer Cina kini merupakan ancaman terhadap nilai – nilai dan kepentingan Amerika. Untuk menghadapi ancaman besar ini Trump bertekad untuk memperkuat kemampuan militer Amerika dengan mengajukan anggaran belanja militer sebanyak 716 dollar. Dengan menambah kekuatan militer tersebut juga bertujuan untuk

keamanan nasional Amerika dari serangan eksternal. Amerika akan mulai meningkatan anggaran belanja militer, yang mulanya 3% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) hingga maksimum 6,5%, seperti yang pernah ia tulis dalam buku *The American We Deserve* (Trump, The American We Deserve, 2002, p. 149). Dalam kebijakan ini, kekuatan militer baru hanya akan digunakan untuk dua hal, yaitu menghancurkan ISIS dan mempertahankan Amerika dari serangan tradisional maupun nontradisional, bukan untuk membantu sekutu Amerika.

C. Konteks Internasional

Konteks Internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri), serta pengaruh dari berbagai negara lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dialami. Dampak buruk perekonomian AS dialami salah satu penyebabnya akibat keterlibatannya dalam berbagai konflik di dunia. Trump akan menjadikan Amerika menahan diri dari terlibat dalam konflik - konflik di dunia dan lebih fokus untuk membangun kekuatan di dalam negeri. Trump melihat intervensi Amerika di berbagai belahan dunia justru memberikan dampak negatif pada relasi Amerika dengan berbagai negara besar, terutama Rusia dan Cina (Nur Rachmat Yuliantoro, 2017).

Di tengah gejala kemunduran Barat, Cina bangkit dengan pertumbuhannya yang cepat menjadi negara dengan kemampuan ekonomi nyaris setara dengan Amerika. Tidak

hanya dari segi ekonomi namun juga militer, teknologi dan budaya. Dapat dikatakan Cina berusaha menyaingi Amerika bahkan merebut status sebagai negara super power berdasarkan posisi pencapaian keunggulan berdasarkan aspek – aspek di atas yang telah diraih oleh Cina. Hal ini jelas menjadi ancaman bagi Amerika karena status sebagai negara super power tersebut tidak dibiarkan begitu saja direbut ataupun adanya negara super power baru dalam percaturan politik ekonomi global. Amerika berusaha menghambat pertumbuhan ekonomi Cina dengan melakukan perang dagang dan memperkuat tembok tebal ekonomi dengan kebijakan proteksionis berupa penetapan tarif dan kuota untuk barang-barang ekspor. Hal tersebut memicu kebijakan proteksionis (Cipto B. , 2018).

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab faktor pendorong proteksionisme ekonomi Amerika Serikat pada era Donald Trump dikarenakan :

1. Tuntutan dan tekanan politik dalam negeri oleh industri dalam negeri Amerika Serikat yang mengalami kerugian akibat kerjasama *Trans Pacific Partnership* serta dorongan dari para pemilih Trump untuk menepati janji kampanyenya pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016.
2. Penurunan kapasitas ekonomi Amerika Serikat berupa angka Produk Domestik Bruto yang tidak mencapai 3%

serta adanya defisit neraca perdagangan antara Amerika Serikat dengan Cina.

E. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui berbagai kebijakan proteksionisme ekonomi Amerika Serikat oleh Donald Trump.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mendorong proteksionisme ekonomi Amerika Serikat pada era Donald Trump.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan dengan jangkauan yang luas, untuk memberikan suatu gambaran dan penjelasan yang akurat berdasarkan fakta terkait kajian ini. Ada pun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan. Dengan menggunakan teknik studi kepustakaan diharap akan menemukan fakta – fakta terkait kajian ini. Data kepustakaan yang dijadikan referensi oleh penulis yaitu berupa buku, jurnal , berita, internet, surat kabar dan artikel terkait kajian yang diteliti.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian maka diperlukan adanya jangkauan penelitian terhadap

penulisan penelitian ini, supaya tidak akan terjadi perluasan pembahasan dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Untuk itu data penulisan ini yaitu Amerika pada era pemerintahan Presiden Donald Trump. Namun penulis juga menggunakan data – data yang relevan dari tahun – tahun sebelumnya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dari penelitian ini terdiri dari lima bab yang menjelaskan faktor – faktor pendorong proteksionisme ekonomi Amerika Serikat pada era Donald Trump.

Bab I	Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.
Bab II	Penulis akan membahas mengenai arah baru kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah Donald Trump yang meliputi dasar politik luar negeri Amerika Serikat, pergeseran kebijakan luar negeri Amerika Serikat dari era Obama ke era Donald Trump, serta kritik Donald Trump terhadap Barack Obama.
Bab III	Penulis akan menjelaskan mengenai Proteksionisme secara umum dan

	bentuk – bentuk proteksionisme ekonomi Amerika Serikat pada era Donald Trump.
Bab IV	Penulis membahas beberapa faktor yang mendorong proteksionisme ekonomi Amerika Serikat pada era Donald Trump
Bab V	Merupakan bab terakhir berisi kesimpulan yang berupa ringkasan dari bab – bab yang sudah dijelaskan sebelumnya